



**RENCANA KERJA (RENJA)  
TAHUN 2022  
BIRO PENGADAAN  
BARANG DAN JASA  
SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI  
BARAT**

## DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b> .....	<b>5</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah.....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	10
2.3. Isi-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	11
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	11
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .	14
<b>BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>15</b>
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	15
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah.....	16
3.3. Program dan Kegiatan .....	16
<b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>17</b>
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	<b>19</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penyusunan RENJA Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022 ini adalah untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7 ayat (1 dan 2) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat.

Dokumen RENJA yang disusun setiap tahunnya memuat evaluasi program, kegiatan dan pendanaan indikatif pada tahun sebelumnya serta rencana untuk tahun yang akan datang, baik program dan kegiatan rutin maupun strategis.

Oleh karena itu, dalam optimalisasi implementasinya diperlukan komitmen dan kesepakatan dari semua pemangku kepentingan guna mencapai tujuan RENJA Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Selain itu juga, diharapkan dapat menjadi jaminan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta optimalisasi partisipasi masyarakat dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada.

Berdasarkan landasan diatas, maka dengan optimalisasi sumber daya serta pembinaan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja yang baik dan tepat, diharapkan

pelaksanaan RENJA yang dimiliki oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa ini dapat berhasil.

## 1.2 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4422);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- g. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 Tentang tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
- j. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 99).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa adalah Sebagai pedoman bagi penyusunan program kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 adalah :

- a. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kegiatan;
- b. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas kegiatan;

### **1.4. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Pendahuluan
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan
- 3.4. Tujuan dan Sasaran OPD

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB VI PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Biro Pengadaan Barang dan Jasa dahulunya merupakan bagian layanan pengadaan dari Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa terbentuk melalui penetapan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Untuk tahun 2021, Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang/Jasa mengusulkan 2 Program dan 8 kegiatan dengan total pagu anggaran Rp. 3.710.128.060,00.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan RENJA dan Pencapaian RENSTRA Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel halaman berikutnya.

Tabel  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA PD dan Pencapaian RENSTRA PD s/d Tahun 2022  
Provinsi Sulawesi Barat

SKPD : Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (RENJA PD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d Tahun Berjalan	
					Target RENJA PD Tahun 2020	Realisasi RENJA PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6/7)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
4.01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>									
4.01.01	<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>									
4.01.01.101	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>									
4.01.01.101.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah yang tersusun	4 dokumen					4 dokumen	4 dokumen	100 %
4.01.01.101.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	4 laporan					4 laporan	4 laporan	100 %
4.01.01.101.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan					1 laporan	1 laporan	100 %
4.01.01.102	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>									



4.01.01.102.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1 laporan				1 laporan	1 laporan	100 %
4.01.01.102.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran yang Tersusun	4 laporan				4 laporan	4 laporan	100 %
4.01.01.106	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								
4.01.01.106.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Makanan yang Disediakan dan Minuman yang Disediakan	11 jenis				11 jenis	11 jenis	100 %
4.01.01.106.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah jenis Barang yang Dicitak Jenis Barang yang Digandakan	10 jenis				10 jenis	10 jenis	100 %
4.01.01.106.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan	40 jenis				40 jenis	40 jenis	100 %
4.01.01.106.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	40 laporan				40 laporan	36 laporan	90 %
4.01.01.108	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								
4.01.01.108.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang Ditindaklanjuti	100 %				100 %	100 %	100 %
4.01.01.109	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								
4.01.01.109.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan Pemeliharaan dan pajak kendaraan	100 %				7 unit	7 unit	100 %

4.01.07	<b>PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>									
4.01.07.101	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>									
4.01.07.101.01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa yang Berkualitas	100 %					100 %	100 %	100 %
4.01.07.101.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sulawesi Barat	100 %					100 %	100 %	100 %
4.01.07.101.03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan pemantauan dan evaluasi pengadaan barang/ jasa	4 laporan					4 laporan	4 laporan	100 %
4.01.07.102	<b>Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik</b>									
4.01.07.102.01	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Tingkat pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik	100 %					100 %	100 %	100 %
4.01.07.102.02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat pengembangan sistem informasi	100 %					100 %	100 %	100 %
4.01.07.102.03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat pengelolaan informasi pengadaan barang/jasa	100 %					100 %	100 %	100 %
4.01.07.103	<b>Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</b>									
4.01.07.103.01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Personil Program Pengembangan SDM	30 orang					30 orang	30 orang	100 %
4.01.07.103.02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Peserta Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	80 orang					80 orang	40 orang	50 %

4.01.07.103.03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Peserta advokasi, pendampingan dan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa	200 Orang					200 Orang	130 orang	65 %
----------------	---	--	-----------	--	--	--	--	-----------	-----------	------

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi pelayanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa dijabarkan dalam program dan kegiatan. Analisis pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini terlihat dari capaian realisasi anggaran sebesar 93,32 % atau Rp 3.462.332.150,- dari pagu setelah perubahan sebesar Rp 3.710.128.060,-

Selain itu dilihat juga dari persentase tingkat penyelesaian pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut :

No	Jumlah Paket	Sukses Tender	Gagal Tender
1	353 Paket	336 Paket	17 Paket

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menghadapi beberapa isu-isu penting, antara lain:

1. Sarana dan prasarana juga masih relatif terbatas, sementara intensitas kerja dan mobilitas personil sangat tinggi
2. Perangkat Daerah tergolong baru sehingga budaya dan etika organisasi yang belum kondusif, masih membutuhkan beberapa penyesuaian terkait pelaksanaan tugas dan fungsi.
3. Tugas dan fungsi belum sesuai dengan beban kerja perorangan.
4. Standar Operasional Pelayanan yang ada belum maksimal implementasinya.
5. Pola pembinaan aparatur yang berorientasi pada peningkatan kinerja belum optimal. Belum adanya kriteria khusus dalam pengembangan kompetensi dan kebutuhan pegawai terutama berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
6. Sistem penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) terhadap kinerja aparatur belum optimal. Utamanya terkait Tambahan Penghasilan yang belum sesuai dengan beban kerja.

### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dalam penyusunan RENJA ini tidak terlepas dari dokumen RKPD yang telah diusulkan sebelumnya, Program/Kegiatan yang diusulkan dalam rancangan RENJA ini seluruhnya telah sesuai dan mengikuti program/kegiatan yang telah diusulkan dalam dokumen RKPD.

Tabel  
 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021  
 Provinsi Sulawesi Barat  
 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>				1.271.449.560	<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>				1.271.449.560	Sesuai
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Biro PBJ Prov. Sulbar	Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup SKPD	60 Poin	143.077.120	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Biro PBJ Prov. Sulbar	Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup SKPD	60 Poin	143.077.120	Sesuai
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Biro PBJ Prov. Sulbar	Persentase Laporan Keuangan	100 %	113.575.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Biro PBJ Prov. Sulbar	Persentase Laporan Keuangan	100 %	113.575.000	Sesuai
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Biro PBJ Prov. Sulbar	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100 %	799.511.640	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Biro PBJ Prov. Sulbar	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100 %	799.511.640	Sesuai
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biro PBJ Prov. Sulbar	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	152.640.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biro PBJ Prov. Sulbar	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	152.640.000	Sesuai
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biro PBJ Prov. Sulbar	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	62.645.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biro PBJ Prov. Sulbar	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	62.645.800	Sesuai

11	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				1.850.000.000	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				1.850.000.000	Sesuai
6	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Biro PBJ Prov. Sulbar dan daerah lainnya	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Prosedur	100 %	681.072.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Biro PBJ Prov. Sulbar dan daerah lainnya	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Prosedur	100 %	681.072.000	Sesuai
7	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Biro PBJ Prov. Sulbar dan daerah lainnya	Persentase Pelaku Pengadaan dalam Menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100 %	292.108.000	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Biro PBJ Prov. Sulbar dan daerah lainnya	Persentase Pelaku Pengadaan dalam Menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100 %	292.108.000	Sesuai
8	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Biro PBJ Prov. Sulbar dan daerah lainnya	Persentase Peningkatan Pemahaman Pelaku dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	100 %	876.820.000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Biro PBJ Prov. Sulbar dan daerah lainnya	Persentase Peningkatan Pemahaman Pelaku dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	100 %	876.820.000	Sesuai
JUMLAH					3.121.449.560	JUMLAH					3.121.449.560

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Biro Pengadaan Barang dan Jasa merupakan unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan salah satu unit kerja administratif yang bertugas merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan bidang pengadaan barang/jasa. Program/Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang tugas dan fungsi hanya bersifat administratif baik dalam bentuk fasilitasi, monitoring dan evaluasi maupun perumusan kebijakan, sehingga dalam program/kegiatan yang direncanakan tidak secara langsung menampung program/kegiatan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun perangkat daerah lainnya.



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam undang-undang tersebut terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

- 1) Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah;
- 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- 4) Optimalisasi partisipasi masyarakat; dan
- 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam pembangunan yang bersinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, maka perlu penyelarasan Arah kebijakan antara Kementerian/Lembaga terkait dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat khususnya yang berkaitan dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa adalah memastikan bahwa arah kebijakan dan strategi pembangunan pada Kementerian/Lembaga terkait berjalan dengan baik dan saling mendukung guna keselarasan pembangunan dari Pemerintah Pusat

hingga Pemerintah Daerah.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah**

Tujuan yang ingin dicapai yaitu terwujudnya tata kelola pengadaan barang dan jasa yang berkualitas.

Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan diperlukan pembiayaan pada Tahun 2022 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut terdiri dari 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan, yang dibiayai oleh dana APBD Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp.2.955.412.341,-

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023  
Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana	TARGET CAPAIAN	(Rp)
1	2	3		6	7	8	9	10
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4.01	SEKRETARIAT DAERAH							
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP OPD		82 Poin	869.613.669	DAU	82 Poin	1.755.000.000
4.01.01.1.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup SKPD	Biro PBJ Prov. Sulbar	60 Poin	90.411.089	DAU	60 Poin	235.000.000
4.01.01.1.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Persentase Laporan Keuangan	Biro PBJ Prov. Sulbar	100 %	66.900.000	DAU	100 %	250.000.000
4.01.01.1.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	Biro PBJ Prov. Sulbar	100 %	401.642.820	DAU	100 %	975.000.000
4.01.01.1.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Biro PBJ Prov. Sulbar	100 %	183.799.760	DAU	100 %	170.000.000

4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biro PBJ Prov. Sulbar	100 %	17.750.000	DAU	100 %	170.000.000
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Biro PBJ Prov. Sulbar	100 %	109.110.000	DAU	100 %	125.000.000
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pengadaan Barang dan Jasa		100 %	1.886.226.672	DAU	100 %	3.550.000.000
4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Prosedur	Biro PBJ Prov. Sulbar dan daerah lainnya	100 %	942.553.580	DAU	100 %	925.000.000
4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Pelaku Pengadaan dalam Menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Biro PBJ Prov. Sulbar dan daerah lainnya	100 %	544.729.000	DAU	100 %	825.000.000
4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Peningkatan Pemahaman Pelaku dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Biro PBJ Prov. Sulbar dan daerah lainnya	100 %	598.516.092	DAU	100 %	1.800.000.000

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa merupakan dokumen rencana tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis.

Rencana kerja merupakan kondisi yang realistis dari perencanaan kegiatan secara menyeluruh yang dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada Tahun 2022.

Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa harus dapat berfungsi sebagai pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2022 baik dalam lingkup program maupun kegiatan.

Demikian RENJA ini dibuat dengan penuh harapan dapat dilaksanakan secara terencana dan terukur.

Mamuju 2022  
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa



**HAMDAN HAMDI, S. IP. M. SI**  
Pangkat : Pembina/IV.a  
Nip : 19790409 200701 1 015